

Judul : Ancaman Covid Masih Nyata, Tetap Jaga Prokes & Vaksinasi
Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

RI Dinyatakan Lewati Krisis Pandemi

Ancaman Covid Masih Nyata, Tetap Jaga Prokes & Vaksinasi

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengimbau masyarakat untuk tetap menegakkan protokol kesehatan dan ikut program vaksinasi. Ini untuk menghadapi ancaman gelombang ketiga Covid-19 di berbagai belahan dunia akibat munculnya varian baru Omikron.

RAHMAD bilang, walau tingkat vaksinasi sudah sampai 56 persen dan 70 persen tahap 1, namun bukan berarti kita longgar dalam menjalankan protokol kesehatan. "Kita harus bercecermin dari negara-negara di Eropa. Meski vaksinasi tinggi namun gelombang Covid terus mengintai," tegas Rahmad di Jakarta, kemarin.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menilai, pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 se-Indonesia menghadapi Natal dan tahun baru (Nataru) masih bersifat situasional. Tidak tertutup kemungkinan level PPKM

dinaikkan jika kasus meningkat khususnya ada Omikron.

Dia berharap, masyarakat dan pemerintah untuk tetap waspada dan tidak boleh kecolongan ancaman gelombang ketiga. Masyarakat tidak usah ngeyel ke luar kota pada masa liburan nataru nanti. Selain itu, program vaksinasi terus ditingkatkan guna meningkatkan imunitas dan kekebalan kelompok.

"Walau kekebalan kita telah meningkat menyusul capaian vaksinasi, bukan berarti kita bebas, apalagi menganggap Covid sudah tidak ada. Covid masih bahaya, masih mengancam. Karena itu kita tidak boleh

terlena dengan kondisi saat ini walau kekebalan kita naik," tambah dia.

Sementara itu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof. Taruna Ikrar menyampaikan lima strategi utama untuk bisa keluar dari pandemi ini. Pertama, terus gencar melakukan vaksinasi massal untuk mencapai *herd immunity*. Kedua, tetap ketat mengikuti protokol keselamatan Covid. Ketiga, menyiapkan alat kesehatan dan obat-obatan Covid untuk didistribusikan secara merata ke seluruh dunia.

Keempat, menyiapkan tenaga dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. "Dan akhirnya, kelima, dunia dan semua pemangku kepentingan di seluruh dunia harus bersatu dan menggabungkan upaya melawan pandemi ini," tegas Taruna.

Taruna menilai, pandemi Covid-19 ini memberikan pelajaran akan pentingnya regulasi

kesehatan yang terkoordinasi, tidak hanya antar instansi tapi juga secara global. Meskipun sudah ada kerja sama regional antar negara, namun belum ada regulasi pertukaran teknologi dan tenaga ahli untuk bekerja di tingkat global, misalnya dalam hal izin dokter di bidang telemedicine.

Karena itu, harus ada lembaga seperti lembaga Konsil Kedokteran Dunia (International Association of Medical Regulatory Authorities/IAMRA) untuk berkontribusi besar dalam menghadapi pandemi global ini. Taruna sendiri baru-baru ini terpilih secara aklamasi menjadi Direktur IAMRA Periode 2021-2024.

"Badan IAMRA dengan jaringan dan kewenangannya mengatur tenaga kesehatan khususnya dokter tentunya memiliki peran besar dalam menekan kasus positif Covid-19 di masa pandemi ini," jelas Taruna.

Sebelumnya, Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menilai Indonesia sudah melalui masa krisis pandemi Covid-19. Hal ini disebut karena kasus Covid-19 harian di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Penilaian itu juga ia bandingkan dengan kondisi Covid-19 sebelumnya yang sempat mencetak rekor tertinggi yang terjadi pada 15 Juli dengan 56.757 kasus, yang notabene merupakan jumlah penambahan tertinggi selama pandemi di Indonesia.

"Kita sudah keluar dari krisis, mudah-mudahan kita tidak kembali pada krisis. Tinggal yang harus kita siapkan adalah *adaptive recovery* dan resiliensi dari sistem kesehatan," kata Adib dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube ILUNI FKUI, kemarin. ■ KAL